

ANALISIS KONFLIK ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENGUNAAN MOBIL PCR DI MASA PANDEMI COVID-19

Indra Nur Ramadhan

UIN Sunan Ampel Surabaya

indrahmed43@gmail.com

Abstract

The purpose of this thesis is to find out the causes behind the conflict between the East Java Provincial Government and the Surabaya City Government in the use of PCR cars, to determine the form of conflict that occurred between the East Java Provincial Government and the Surabaya City Government in the use of PCR cars, and also to know the conflict resolution taken by the East Java Provincial Government with the Surabaya City Government. This study uses a qualitative research method with a descriptive qualitative approach. The results of this study explain about 1.) The background of the cause of the conflict is the difference in the interests of the Surabaya City Government which wants its territory to immediately accelerate the detection of Covid-19 for the citizens of Surabaya City, while the interests of the East Java Provincial Government are to balance the needs in other areas that need assistance, and there was a miscoordination on the scheduling of this PCR car assistance. 2.) The forms of conflict patterns that occur are included in the type of interpersonal conflict which is a conflict between a group within the same organization, on the other hand the form of this conflict pattern includes latent and manifest conflicts because seen from the triggers of the conflict already visible or open, and has been known to many parties. 3.) Conflict resolution taken by the two parties uses a negotiation method with rescheduling for the purposes of the City of Surabaya

.Keywords: Bentuk Konflik; Penyebab Konflik; Resolusi Konflik

Pendahuluan

Di Indonesia penerapan sistem pemerintahan desentralisasi ini sudah dapat dirasakan pada masa awal reformasi sampai sekarang, Apapun pengertian sistem desentralisasi tersebut yang terpenting adalah adanya keharmonisan antara politik, administrasi dan fiskal. Arti dari desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola daerahnya, sedangkan desentralisasi administrasi mengajarkan arah cara menjalankan pelimpahan kewenangan tersebut, dan desentralisasi fisa juga untuk urusan pembiayaan pelimpahan kewenangan (Prayudi, 2014: 296). Prinsip desentralisasi di Indonesia yaitu pemerintahan daerah mulai dari pemerintahan provinsi

dan juga pemerintahan kota atau kabupaten memiliki otonomi daerahnya yaitu daerah tersebut mempunyai kewenangan dalam mengelola daerahnya masing-masing tanpa adanya campur tangan pemerintahan pusat.

Penerapan desentralisasi di Indonesia yang dimulai pada masa reformasi ini membuat peran pemerintah daerah semakin nyata terhadap daerah-daerah yang dikelolanya. Namun dalam implementasinya, sistem desentralisasi ini masih mengalami beberapa problematika yaitu (Kristian Widya Wicaksono, 2012: 25): *Pertama*, banyaknya peraturan daerah yang bermasalah. *Kedua*, masih banyak anggaran daerah yang digunakan untuk belanja pegawai. *Ketiga*, maraknya pemekaran wilayah. *Keempat*, lemahnya perolehan pendapatan daerah. *Kelima*, adanya ketidak selarasan koordinasi antar kepala daerah dengan kepala pemerintahan pusat ataupun kepala daerah provinsi dengan kepala daerah kabupaten/ kota. *Keenam*, kesiapan aparatur kepala daerah. *Ketujuh*, masalah kesenjangan wilayah.

Dari beberapa problematika desentralisasi yang terjadi di Indonesia, salah satu kasus yang sudah terjadi ialah tentang konflik pemerintah provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kota Surabaya terkait penggunaan mobil PCR di masa pandemi Covid-19 ini. Awal konflik itu terjadi ketika bantuan dari pemerintah pusat berupa bantuan mobil PCR untuk membantu mempercepat deteksi virus Covid-19 pada pasien di rumah sakit tetapi mengalami permasalahan ketika diarahkan ke wilayah Jawa Timur terkhusus di Surabaya, ditambah lagi adanya rekaman video dari walikota Surabaya Tri Risma Harini yang berisi bahwa kota Surabaya sudah meminta dahulu bantuan tersebut tetapi oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dialihkan ke kota lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis memilih judul “Analisis Konflik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam penggunaan mobil PCR di masa pandemi Covid-19” dengan suatu alasan penting yaitu untuk mencoba mengetahui anatomi konflik yang terjadi antar pemerintah, terkhusus pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten. Anatomi konflik ini berguna untuk mengerti latar belakang konflik, bentuk konflik yang terjadi, maupun resolusi konflik yang diambil antara pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah kota Surabaya.

Teori Konflik

Pada hakikatnya, konflik merupakan bentuk pertentangan terhadap suatu ide maupun perbedaan pendapat, serta perbedaan tujuan diantara beberapa pihak yang terlibat sehingga semua pihak dapat memperjuangkan kepentingan yang diinginkan bahwa keinginan tersebut baik untuk bersama. Bahkan konflik tersebut awalnya berupa nonfisik hanya sebatas adu argumen bisa saja menjadi konflik fisik yang biasa kita sebut dengan kekerasan

Adapun beberapa pengelompokan beberapa konflik yang di lihat dari banyaknya pihak yang ikut serta didalam konflik tersebut yang terbagi menjadi dua bentuk kriteria, yaitu Konflik personal, yaitu kejadian yang dialami ketika seseorang itu mengalami pertentangan didalam dirinya sendiri ketika dihadapkan dengan pilihan yang ada. Konflik interpersonal, konflik ini terjadi ketika didalam organisasi yang melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Fisher, menjelaskan bentuk pola konflik dapat dibagi kedalam tiga bentuk konflik, *Pertama*. Konflik latent, konflik ini berbentuk konflik yang tersembunyi artinya perlu dibahas di publik atau diangkat menjadi bahasan publik untuk dapat diselesaikan secara cepat dan efektif. *Kedua*. Konflik terbuka, konflik ini termasuk konflik yang dalam, artinya mempunyai akar permasalahan yang sangat beragam dan juga akan berakibat timbulnya beberapa efek baru sehingga harus adanya penanganan yang benar dalam mengatasi konflik tersebut. *Ketiga*. Konflik permukaan, konflik ini mempunyai akar permasalahan yang dangkal dan timbul hanya karena salah paham tentang suatu hal dan dapat di selesaikan dengan komunikasi yang baik.

Dasar penyebab terjadinya konflik ialah adanya dua kemajemukan yaitu kemajemukan horizontal lalu kemajemukan vertical. Bentuk dari kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat seperti ras, suku, daerah dan juga agama sedangkan kemajemukan vertical adalah struktur masyarakat berdasarkan kekayaan ataupun pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan kepentingan berdasarkan kemajemukan baik horizontal maupun vertical akan mengakibatkan adanya konflik

Penyelesaian konflik secara bertahap yaitu *Pertama*. Pengenalan, maksudnya adalah kepekaan terhadap permasalahan harus ditingkatkan, kesimpulannya seperti paham akan kondisi di lapangan. Karena salah satu penyebab konflik adanya ketidak pahaman atau miss komunikasi ini dapat diselesaikan jika kita paham kondisi di lapangan. *Kedua*.

Diagnosis, cara ini merupakan pengujian tentang siapa, apa, dimana, mengapa dan bagaimana konflik ini terjadi. Fokus pengujiannya ialah dengan permasalahan yang utama. *Ketiga*. Solusi, kumpulkan semua pihak-pihak yang mengerti dalam permasalahan tersebut dan carilah solusi yang terbaik. *Keempat*. Pelaksanaan, ketika sudah mendapatkan solusi yang terbaik laksanakan secara baik tetapi kita harus mengerti bahwa setiap solusi akan menimbulkan keuntungan maupun kerugian yang lain. *Kelima*. Evaluasi, jika solusi itu gagal atau malah menimbulkan kerugian yang lain maka lakukanlah cara tersebut dari awal dan memikirkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan konflik tersebut (Mohammad Muspawi, 2014: 46).

Teori Kewenangan

Philipus M Hadjon menjelaskan jika pemerintah ingin melakukan tindakan maka harus bertumpu pada wewenang yang sah. Hal itu juga didukung kuat oleh UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menjadi landasan tindakan pemerintah. Hal itu menjelaskan bahwa setiap lembaga pemerintah dan kenegaraan harus mempunyai legitimasi hukum seperti undang-undang.

Menurut pemikiran H.D Van Wijk dan Willim Konijnenbelt sumber kewenangan diperoleh melalui tiga hal yaitu (Ridwan, 2006: 101):

a. Atribusi

Atribusi adalah sebuah wewenang pemerintah yang sumbernya berasal dari sebuah undang-undang. Pemberian kewenangan ini sumber utamanya ialah dari undang-undang dasar 1945 atau juga dapat berasal dari undang-undang yang berlaku kepada suatu kelembagaan dan dapat dipakai secara terus menerus jika hal itu diperlukan.

b. Delegasi

Delegasi adalah sebuah wewenang yang terjadi karena didapat dari pelimpahan jabatan ataupun badan usaha milik negara yang telah mendapat wewenang dari pemerintahan secara atributif kepada badan atau sebuah jabatan usaha negara.

c. Mandat

Mandat adalah sebuah janji-janji dalam lingkup kerja yang terjalin antara pimpinan maupun bawahan dalam hal itu pegawai/bawahan memperoleh sebuah kewenangan atas sebuah nama pimpinan. Syarat sah dalam pemberian mandat, berisi tiga syarat yaitu (Indroharto, 1991: 64-67): a) mau menerima pemberian mandat, b) wewenang tersebut

harus sesuai dengan pribadi yang dimandati, c) tidak menentang sebuah undang-undang yang berlaku.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif, berlokasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti mengalami kendala dalam menentukan subjek informan penelitian sebab dari pihak Pemerintah Kota Surabaya merasa keberatan untuk melakukan pemaparan penjelasan mengenai konflik yang terjadi, sehingga peneliti hanya mendapatkan satu subjek informan penelitian yaitu Kemal Faruq sebagai Kasubag BPBD Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa BPBD Jawa Timur sebagai bagian logistik dalam Gugus tugas Covid-19 wilayah Jawa Timur. Lalu untuk menambahkan datanya peneliti menggunakan berita media mulai dari penjelasan Dr. Joni Wahyuhadi yang menjadi Gugus Kuratif Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa beliau yang mengerti tentang penjadwalan mobil PCR. Lalu penjelasan pihak penerima bantuan mobil PCR yaitu Walikota Surabaya Tri Rismaharini serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Peneliti menggunakan studi lapangan dengan metode wawancara serta dokumentasi. Lalu ditambahkan studi berita online untuk pengumpulan data, karena penelitian ini berbentuk deskriptif maka analisis datanya ialah analisis deskriptif. Arti dari analisis deskriptif adalah hasil analisis datanya akan berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi sesuai dengan permasalahannya. Dengan menggunakan cara deskriptif maka hasil deskripsinya akan terpusat ke penjabaran terhadap suatu peristiwa atau juga kejadian permasalahan yang diteliti. Tahapan analisis data penelitian ini yaitu: Reduksi Data, dalam tahap ini pengerjaannya mengerucutkan, memisahkan dari yang tidak perlu agar mendapatkan pokok-pokok penemuan. Penyajian Data Pada tahap ini ialah melanjutkan dari hasil reduksi data pada tahap sebelumnya. Pengertian dari penyajian data ini adalah tahap untuk melakukan hubungan antar pengelompokan data dalam bentuk uraian singkat, penyajian data juga berbentuk sebuah susunan yang mempunyai kemungkinan untuk disimpulkan, atau juga dapat diartikan tindakan penelaah data untuk menghasilkan data yang didapat dari berbagai sumber data. Kesimpulan, Pengertian kesimpulan menurut Miles dan Huberman, tahap ini adalah kesimpulan awal yang bersifat sementara sehingga jika tidak ada bukti lagi untuk memperkuat suatu data

maka akan berubah. Secara maksudnya ialah kesimpulan awal ini ialah jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Awal kejadian konflik ini bermula pada saat pandemi Covid-19 mulai memasuki wilayah Provinsi Jawa Timur. Terkhusus di wilayah Kota Surabaya menjadi kota yang punya penyebaran kasus Covid-19 yang tinggi. Oleh karena itu dalam penyelesaiannya, bantuan berupa mobil PCR dari Pemerintah Pusat didatangkan agar dapat membantu untuk membaca para pasien yang terkena Covid-19 dengan cepat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 Mei 2020 akhirnya membuat surat permohonan mengenai dukungan untuk penegakan diagnosis Covid-19, serta pada tanggal 22 Mei 2020, Risma selaku Walikota Surabaya mengirimkan surat kepada BPBD Jatim Untuk pengajuan permohonan bantuan tes swab mobil PCR sebanyak 2 unit mobil.

Dari beberapa pengajuan permohonan tersebut maka Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur membuat jadwal pengoperasian Mobil PCR pada tanggal 27-29 Mei 2020. Dari surat tersebut akhirnya terjadwalkan pada tanggal 27 mei 2020 sebanyak 2 unit bantuan mobil PCR untuk beroperasi di Surabaya, 1 Unit di tempatkan di RS Unair mengerjakan 100 sampel dan pada malam hari datang 1 unit tambahan mobil PCR ditempatkan di RS Asrama Haji. Hari kedua yaitu pada tanggal 28 mei 2020, penempatan 1 unit mobil PCR di wilayah Sidoarjo. Sekitar 108 sampel diidentifikasi di RSUD Sidoarjo. Kemudian 1 unit mobil PCR lainnya ditempatkan di RSU Haji untuk melakukan lanjutan identifikasi sampel sisa 90 sampel kemudian bertambah pengerjaan sampel baru sekitar 100 sampel, sehingga total pengerjaan di hari kedua itu 190 sampel untuk unit mobil PCR di RSU Haji. Lalu di hari ketiga, yaitu pada tanggal 29 mei 2020, 2 unit bantuan mobil PCR itu ditempatkan di wilayah Tulungagung dan Lamongan. Penempatannya yaitu 1 unit di RSUD Tulungagung yang beroperasi mengerjakan 200 sampel dan di RSUD Lamongan yang mengerjakan 100 sampel sehingga totalnya 300 sampel di hari itu.

Disini konflik mulai terjadi, pihak walikota Surabaya menyangkan karena mobil yang seharusnya beroperasi di wilayah kota Surabaya malah dialihkan ke Tulungagung dan Lamongan. Risma sampai menyatakan bahwa Doni Munardo selaku Ketua Satgas Covid-19 pusat sudah melakukan perjanjian untuk memprioritaskan Kota Surabaya untuk

menerima bantuan karena pada saat itu kondisi wilayah Kota Surabaya memiliki jumlah terbanyak positif Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut pihak Pemerintah Provinsipun mengklaim bahwa pihak Pemprov yang terlebih dahulu untuk meminta bantuan mobil PCR tersebut. Akhirnya konflik saling klaimpun terjadi pada saat itu.

Gubernur Jawa Timur menjelaskan alasan penempatan mobil PCR diluar Surabaya, salah satunya penempatan mobil PCR di wilayah Tulungagung pada tanggal 29 Mei 2020. Pada wilayah Tulungagung memang banyak pasien PDP yang belum sempat di tes sebelum meninggal. Wilayah lain seperti Sidoarjo butuh bantuan mobil tersebut, karena di wilayah Sidoarjo hanya mampu mengerjakan 16 sampel setiap harinya. Wilayah Lamongan hanya mampu mengerjakan 12 sampel setiap harinya karena itu Gubernur Jawa Timur jika tidak menempatkan bantuan mobil PCR tersebut maka tidak akan selesai untuk menanggulangi Covid-19 di wilayah Jawa Timur untuk itu beliau mengharapkan memaksimalkan bantuan mobil PCR tersebut untuk percepatan serta konfirmasi untuk tes swab PCR. Khofifah menambahkan jika wilayah Surabaya mempunyai tujuh laboratorium besar untuk melakukan tes swab PCR, beberapa alat itu berada di RSUD Dr. Soetomo, RS Premier, RS National Hospital, RS Unair. Meskipun alat tes swab PCR di RS Unair pada saat itu bermasalah tetapi masih ada 6 laboratorium besar yang masih dapat membantu menyelesaikan tes swab PCR secara optimal dibandingkan wilayah selain Surabaya.

Latar belakang permasalahan yang menyebabkan munculnya konflik bantuan mobil PCR yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya

Bantuan ini untuk wilayah Jawa Timur bukan hanya Kota Surabaya saja, karena wilayah-wilayah lain juga harus diurus dalam tugas penanganan Covid-19 sehingga wilayah lain juga berhak mendapatkan bantuan mobil PCR, disamping itu alat-alat untuk tes swab PCR di Surabaya yang salah satunya berada di RSUD Dr. Soetomo, RS Premier, RS National Hospital tersebut dapat digunakan secara optimal.

Pemerintah Kota Surabaya sedang memperjuangkan daerahnya untuk segera mendapatkan bantuan mobil PCR untuk warga Surabaya agar dapat mendeteksi secara cepat Covid-19 karena pada saat itu penyebaran sangat tinggi untuk daerah Surabaya dan

mengkhawatirkan sampai pada peta penyebaran daerah Surabaya termasuk zona merah. Hal lain yang mendasari keinginan Pemerintah Kota Surabaya untuk menggunakan bantuan mobil PCR di Kota Surabaya ialah karena ingin segera mendeteksi dengan cepat warganya jika terkonfirmasi Covid-19.

Sedangkan kepentingan atau tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan mobil PCR ini juga memikirkan daerah lainnya, seperti di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Lamongan. Karena angka Pasien Dalam Pengawasan di Provinsi Jawa Timur meningkat dengan pesat pada tiga bulan pertama. Alasan yang lain karena Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Lamongan belum memiliki fasilitas untuk alat PCR di RSUD mereka berbeda dengan Kota Surabaya yang sudah mempunyai alat tes PCR di banyak rumah sakit, seperti di RSUD Dr. Soetomo.

Bentuk pola konflik yang terjadi antara pemerintah provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kota Surabaya atas saling klaim bantuan mobil PCR dari pemerintah pusat

Konflik bantuan mobil PCR yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya ini bisa dikelompokkan dengan konflik laten dan manifest. Secara singkatnya konflik laten ini memiliki potensi untuk menghasilkan konflik manifest, konflik laten atau yang sering disebut konflik tertutup ini terjadi ketika kondisi yang terlihat biasa seakan-akan tidak ada apapun namun dibalik itu semua ada pemicu konflik yang secara tidak sadar tidak terlihat, lalu konflik manifest disebut konflik terbuka karena sudah terlihat dipermukaan. Jadi konflik laten sebagai gejala untuk menuju pada konflik manifest. Gejala tersebut dapat berupa rendahnya kinerja, ketimpangan sosial dan lain sebagainya (Sri Wahyuni: 12).

Pada konflik ini ditemukan adanya perbedaan pendapat seperti Pemerintah Kota Surabaya ingin mendapatkan bantuan Mobil PCR itu untuk kebutuhan daerahnya sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin bantuan mobil PCR itu tidak hanya digunakan di Kota Surabaya melainkan untuk wilayah lainnya juga seperti Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tulungagung karena Kabupaten tersebut belum mempunyai alat PCR seperti yang terdapat di Surabaya. Oleh sebab itu bentuk konflik yang terjadi pada konflik bantuan Mobil PCR dapat dikatakan konflik laten (tertutup) dan konflik manifest (terbuka), awal konflik tertutup tidak terlihat pemicu konfliknya tetapi ketika

pemicu konflik itu terlihat maka akan menuju konflik manifest atau konflik terbuka yang sudah diketahui pemicunya.

Konflik ini muncul ketika Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan kekecewaan terhadap bantuan mobil PCR yang dialihkan ke daerah lain. Sebelum pemicu tersebut diungkap maka awalnya berbentuk konflik laten karena bahwa keadaan berjalan seperti normal, bantuan mobil PCR itu dapat beroperasi sesuai jadwalnya karena belum terdeteksi pemicunya. Setelah pemicu tersebut diungkap secara terbuka maka konflik itu masuk kedalam golongan konflik manifest karena sudah menjadi konflik terbuka bahkan dimedia massa karena sudah terdeteksi pemicunya.

Resolusi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelesaian konflik memperebutkan bantuan mobil PCR dari Pemerintah Pusat

Bentuk resolusi konflik pada permasalahan ini memakai pendekatan negosiasi, artinya salah satu bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan para pihak yang terlibat konflik. Caranya menyampaikan sebuah tujuan yang akan membentuk suatu keputusan bersama, keputusan itu harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat agar tidak terjadi masalah yang baru. Negosiasi ini dilakukan tanpa adanya campur tangan pihak lainnya yang tidak terikat permasalahan, tujuannya untuk menentukan keputusan yang disepakati secara bersama.

Pembuatan jadwal baru menjadi resolusi konflik permasalahan ini, sehingga pada tanggal 30 Mei 2020 mobil PCR dapat beroperasi di Kota Surabaya. Dalam pembuatan jadwal ulang tersebut tidak ada hambatan karena langsung melakukan koordinasi antara Gugus Tugas Jawa Timur, dengan permintaan yang diminta oleh Pemerintah Kota Surabaya maka mobil PCR dapat dipakai.

Penempatan mobil PCR ini pada tanggal 30 Mei 2020 sebagai bentuk resolusi atas kesalahan yang ada maka akan ditempatkan pada RS Menur untuk menangani sampel sebanyak 100 dan mobil kedua di RSUD Dr. Soewandhie yang akan menangani 100 sampel juga. Pada tanggal 31 Mei 2020 tepatnya, mobil PCR ini akan di operasikan untuk Kabupaten Kediri dan Mobil kedua beroperasi di RSUD Sidoarjo yang akan mengerjakan masing-masing 100 sampel.

Kesimpulan

Adapun dua penyebab yang menjadi timbulnya konflik ini, yaitu: *Pertama*, perbedaan kepentingan yang menjadi penyebab konflik ini dikarenakan dua pihak mengelola sebuah wilayah yang berbeda oleh karena itu kepentingan seorang pemimpin daerah akan berbeda beda. *Kedua*, adanya miskordinasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Dari bentuk polanya, maka bisa dikatakan konflik laten dan manifest. Berbentuk konflik laten karena belum terlihat pemicu konfliknya, ketika pemicu konfliknya sudah mulai terlihat maka akan berubah menjadi konflik manifest. Pada konflik ini pemicunya ialah kekecewaan Walikota Surabaya Tri Rismaharini menanggapi pengalihan bantuan mobil PCR ke daerah lain, jika pemicu tersebut belum diangkat secara terbuka maka konfliknya berbentuk konflik laten karena masih tersembunyi, tetapi ketika pemicu itu diangkat secara terbuka dan diketahui oleh beberapa pihak maka konflik itu berbentuk manifest. Pada penelitian konflik ini bentuk resolusi yang diambil menggunakan pendekatan negosiasi, yaitu penjadwalan ulang untuk pengoperasian mobil PCR sesuai dengan permintaan Kota Surabaya. Pada tanggal 30 Mei 2020 langsung dijadwalkan di wilayah Kota Surabaya sebanyak 2 unit. Penggunaan negosiasi diambil karena semua pihak yang terlibat langsung mendiskusikan ketika adanya permasalahan sehingga tanpa bantuan ataupun pihak lain yang membantu menyelesaikan permasalahan ini..

Daftar Pustaka

- Andi Nur Aminah <https://republika.co.id/berita/qb4jks384/ini-kronologi-bantuan-mobil-pcr-bnpb-yang-dipersoalkan-risma> diakses pada tanggal 8 Juni 2021
- Antara, <https://www.jpnn.com/news/aktivis-curigai-pemprov-jatim-mau-bikin-surabaya-seperti-wuhan> diakses pada 27 November 2020
- CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603085116-20-509281/zona-hitam-surabaya-dan-siasat-risma-akhiri-corona> diakses pada tanggal 15 Juni 2021
- Faiq Azmi Detik News <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5034152/penjelasan-gugus-tugas-jatim-soal-mobil-pcr-yang-dipertanyakan-risma> diakses pada tanggal 8 Juni 2021
- Indroharto. 1991, “Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan)
- Liza Tambunan <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52905012> Diakses pada tanggal 15 Juni 2021

- Muspawi, Mohamad. 2014, “MANAJEMEN KONFLIK (UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ORGANISASI)”, Volume 16, Nomor 2
- Prayudi. 2014, “Desentralisasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Politik Negara di Tengah Hubungan Pusat-Daerah”, Kajian Vol. 19 No.4
- Ridwan. 2006, “Hukum Administrasi Negara”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- Tim Cek Fakta <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/04/104009665/klarifikasi-penjelasan-zona-hitam-surabaya-bukan-hitam-tetapi-merah-tua?page=all> diakses pada 15 Juni 2021
- Tim CNN <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200530075357-20-508157/kronologi-kisruh-mobil-pcr-antara-risma-dan-pemprov-jatim> diakses pada tanggal 8 Juni 2021
- Wahyuni, Sri “KONFLIK MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PALAKKANG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR“,
- Wicaksono, Kristian Widya. 2012 “Problematisa dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia”. Jurnal Bina Praja Vol. 4 No. 1